

“pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan” (studi empiris pada organisasi pemerintah daerah kabupaten semarang)

Desy Dwi Rachmawati
dwiradesy50@gmail.com*)
Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Sri Anik
Srianik@unissula.ac.id***)
Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the Effect of Application of Government Accounting Standards, Quality of Local Government Apparatus, Good Governance, and Utilization of Information Technology on the Quality of Financial Statements. The population of this study is the population is a Local Government organization (OPD) in Semarang Regency, with a total of 120 respondents taken using the purposive sampling method. The type of data used is primary data using questionnaire data collection methods. The analytical method in this study is multiple regression analysis. The results of this study indicate that the application of SAP has a positive and significant effect on the quality of financial statements, the quality of the Regional Government Apparatus does not have a significant effect on the quality of financial statements, Good governance has no significant positive effect on the quality of financial statements. The use of Information Technology has a positive and significant effect on the quality of financial statements.

Keywords: *Government Accounting Standards, Quality of Government Apparatus, Good Governance, Utilization of Technology and Quality of Financial Statements.*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik Soimah (2014). Pemerintah pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) Mardiasmo (2006).

Salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak publik yaitu dengan melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan Hariyanto (2012).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013). Pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatannya yang dilakukan disajikan dalam Laporan Keuangan yang terdiri dari 7 jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Nurillah, 2014). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Husna, 2013).

Pemerintah pusat selalu berupaya menyalurkan dana ke daerah secara tepat waktu dengan harapan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan public secepat mungkin. Hal itu tak lain bertujuan untuk mendorong perputaran uang dan perekonomian dimasyarakat. Namun yang terjadi dilapangan, pada Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga akhir Oktober 2019 menyatakan bahwa Total saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dana yang menganggur di pemerintah di beberapa daerah terpantau membengkak. Dana tersebut mencapai sebesar Rp 261 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan periode tahun lalu yaitu Rp 225 triliun. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Kemenkeu, fenomena tersebut merupakan indikasi bahwa masih banyak daerah tidak membelanjakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara produktif. Untuk mengoptimalkan bagian dari TKDD ini, pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi daerah yang dianggap bermasalah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan

taatasas. Namun berdasarkan fenomena yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak daerah yang belum optimal dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berarti belum dapat menunjukkan kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, masih perlunya usaha pemerintah untuk terus mengoptimalkan kualitas laporan keuangan daerahnya dengan mempelajari faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi pemerintahan) yang merupakan media yang di gunakan oleh entitas pelaporan keuangan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik (pihak yang berkepentingan). Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diganti dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Dari 542 LKPD Tahun 2018, sebanyak 99 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 86 WDP dan 13 TMP. LKPD Tahun 2018 belum memperoleh opini WTP karena terdapat akurasi dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup (www.bpk.go.id).

Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan secara efektif, akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junnaini (2012) yang membuktikan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2011) dan Arif Ardi Kusumah (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas pada entitas pemerintah maka harus didasari pula dengan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas. Kualitas aparatur pemerintah menjadi hal yang sangat krusial, sebab di tangan aparatur pemerintah inilah yang akan menghasilkan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap publik. Pada kenyataannya, sudah menjadi permasalahan umum bahwa di instansi pemerintah daerah penataan personil seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan aspek kualitas, penataan personil yang dilakukan seringkali tidak mengikuti prinsip "*the right man on the right place*". Hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan sementara kualitas sumber daya aparatur yang ada belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi (Aruan, 2003).

Kemampuan sumber daya manusia yang kompeten terhadap pengelolaan keuangan tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, pemahaman aparatur atas penerapan PP NO. 71 Tahun 2010 sebagai standar akuntansi pemerintahan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan

keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian dari Solikin & Kustiawan, (2012) menyatakan bahwa pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Oktarina, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kualitas apatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lainnya dari Rahmawaty, (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, yang artinya adalah aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan akan lebih berpotensi melakukan pencegahan kecurangan keuangan supaya tidak merugikan masyarakat.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. Salah satu bentuk upaya penerapan *good governance* dalam bidang pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pemberlakuan kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan sistem desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. *Good governance* dikenal dengan adanya lima prinsip utama, kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, dan keadilan (Pratolo, 2010). Apabila prinsip itu diterapkan dalam suatu pemerintahan daerah, maka *good governance* akan tercapai dan kinerja sebuah pmda yang dapat dilihat dari kualitas laporan keuangannya akan menjadi lebih baik.

Penelitian ini mengkaji ulang dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyawan (2009), Yusuf (2009), dan Pratolo (2010) yang menyatakan bahwa *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal yang sama diperoleh dari penelitian Nasrun (2018) bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi mungkin mempengaruhi kualitas pada pelaporan keuangan entitas akuntansi, selain faktor sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem 8 Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No.11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat ini. Dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang, instansi-instansi pemerintah sudah mulai meninggalkan sistem manual, beralih ke sistem komputer. Namun yang menjadi kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada dan keterbatasan dana yang dimiliki. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal karena masih sedikit situs web pemerintah yang update mengenai informasi keuangannya.

Pemanfaatan teknologi informasi

yang optimal tentunya akan sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pamungkas (2017) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Oktarina, dkk (2016) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian (Wiraputra, 2014) menunjukkan pengaruh pemahaman SAP dan Latar belakang pendidikan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif. (Nordiawan dan Hertianti, 2010) menyatakan bahwa bahwa penerapan SAP berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

Hasil Penelitian Kiranayanti & Erawati, (2016) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan pemahaman Akuntansi berbasis Akrua mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan dengan (Inapty, dan Martiningsih, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan SAP, kompetensi Aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian (Sugiarto, dan Alfian, 2014) serta (Kusuma, 2013) menduga bahwa variabel teknologi informasi

mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah. Hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian Prpto, (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan masih terdapat *research gap* yang berupa perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba kembali menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan acuan pada penelitian yang dilakukan oleh Oktarina, (2016) dengan perbedaan, penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi, dan menggunakan sampel pemerintahan di Kabupaten Semarang serta penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance*, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**.

LANDASAN TEORI

Teori Stewardship

Teori *Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manager tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut (Donalson&Scannel, 1993) teori *Stewardship* didefinisikan sebagai suatu situasi dimana

manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini berasumsi bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik baiknya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Dalam teori ini manajer lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Berdasarkan kepada asumsi bahwa teori *Stewardship* yang menyatakan bahwa manager akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang efektif bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan manager atau *Steward* dan pemilik atau prinsipal berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan secara ekonomi.

Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan daerah, ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan daerah dengan teori *Stewardship*. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *prinsipal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, social maupun politik. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintah lebih dominan bertindak sebagai *Steward*.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki banyak informasi dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat (dalam masa pilkada) memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan LKPD yang baik. Ini dilakukan sebagai upaya dalam mengaktualisasi diri sebagai pegawai pemerintah yang patuh maupun untuk tujuan politik seperti mencari simpati agar bisa terpilih dalam pemilihan selanjutnya, atau sebagai bentuk upaya dalam mendapat kepercayaan publik.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. SAP merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi.

Halim & Kusufi (2014) mengemukakan bahwa tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Hasil penelitian Adhi & Suardjo (2013) yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Tual mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal yang sama juga didukung oleh hasil penelitian Munasyir (2015) yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang profesional dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi

pemerintahan. PNSD yang professional akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD yang professional akan dapat memenuhi standar dan target kinerja yang telah ditetapkan. PNSD yang kompeten di bidang akuntansi (keuangan) mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Penerapan SAP membutuhkan kompetensi PNSD agar laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi yang *useful*.

Hasil penelitian Daniel, dkk (2013) mengatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal yang sama juga didukung oleh hasil penelitian Oktarina, dkk (2016) yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang menyatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di muka, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H2: Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak masyarakat demi meningkatkan suatu kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku secara universal. Hal ini dapat juga menjadi factor terwujudnya suatu kualitas pelaporan keuangan yang baik pada instansi pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penelitian Nasrun, (2018) mengatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Oktarina, dkk (2016) yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Semarang yang menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Teknologi informasi yang terus berkembang dewasa ini tentu dapat dimanfaatkan oleh entitas pemerintah sebagai alat bantu dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas secara efektif, efisien dan ekonomis, dengan adanya system komputer dapat membantu entitas pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2017) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Rahayu dkk (2017) yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar yang juga mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN POPULASI DAN SAMPEL Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang meliputi objek dan subjek yang didalamnya memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari lebih lanjut dan kemudian untuk di tarik kesimpulannya dari hal tersebut (Sugiyono 2011:61).

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Semarang yang meliputi dinas, badan, kantor, sekertaris daerah, dan sekertaris DPRD. Alasan memilih OPD di Kabupaten Semarang untuk dijadikan sumber data yaitu karena Kabupaten Semarang telah memperoleh predikat WTP dari BPK secara berturut-turut selama 8 tahun belakangan ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti sebagian faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Sampel merupakan bagian yang ada didalam populasi yang terwakili dan akan dijadikan sebagai alat penelitian atau beberapa jumlah karakteristik dari populasi yang terwakili (Wiyono, 2011). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Aparatur pemerintah yang menduduki jabatan seperti kepala bagian, kepala sub bagian dan staf-staf bagian keuangan.
2. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam Organisasi Pemerintah Daerah
3. Mengetahui dan terlibat secara langsung dalam penyusunan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

Sampel

Variabel dan Pengukuran

No.	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Sumber
1.	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi Tujuannya	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Sudiaranti, dkk (2015)
2.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	PSAP meliputi 1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas laporan keuangan	Sudiaranti, dkk (2015)

			5. Akuntansi Persediaan 6. Akuntansi Investasi 7. Akunansi Aset Tetap 8. Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan 9. Akuntansi Kewajiban 10. Koreksi kesalahan 11. Laporan Keuangan Konsolidasi 12. Laporan Operasional	
3.	Kualitas Aparatur Pemeritah Daerah (X2)	Kemampuan sumber daya manusia yang bekerja pada pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman mengenai tugas dan tanggung- jawab terhadap kewajiban.	1. Latar belakang pendidikan; 2. Pengetahuan; 3. Pengalaman. 4. Sikap	Octarinda, (2016)
4.	<i>Good Governance</i> (X3)	Tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.	1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Pertanggung jawaban. 4. Efektivitas	Ardira, (2014)
5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan keuangan pemerintah daerah	1. Ketersediaan perangkat komputer dan jaringan internet dit tiap Satuan kerja 2. Pemanfaatan jaringan internet sebagai penghubung dalam pertukaran data 3. Penggunaan <i>software</i> untuk pengolahan data transaksi keuangan 4. Pemeliharaan teknologi informasi	Desmiyati (2014)

TEKNIK ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ; analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dengan uji simultan (uji-F) dan uji parsial (uji-T) dan koefisien determinasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 26.

MODEL REGRESI LINIER BERGANDA

Pengujian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena pada penelitian ini menggunakan variabel independen (X) lebih dari satu. Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2), Good Governance (X3), Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap variabel dependen

Kualitas Laporan Keuangan (Y). Adapun persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

a = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

β_2 = Koefisien Regresi Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

β_3 = Koefisien Regresi *Good Governance*

β_4 = Koefisien Regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi

X1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X2 = Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

X3 = Good Governance

X4 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

e = Standar Error

HASIL ANALISIS DATA

ANALISIS DESKRIPTIF

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan SAP	72	38	60	49,97	6,539
Kualitas Aparatur Pemda	72	18	31	24,58	2,949
Good Governance	72	33	48	40,99	3,625
Pemanfaatan TI	72	26	40	33,29	3,338
Kualitas Laporan Keuangan	72	41	57	48,44	3,476
Valid N (listwise)	72				

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan secara rinci pada setiap variabel adalah sebagai berikut:

a. Variabel penerapan SAP terdiri dari 12 butir pertanyaan. Dengan skala likert 1-5. Pada variabel penerapan SAP mempunyai

nilai minimum 38 dan nilai maksimum 60. Nilai *mean* 49,97 dengan standar deviasi sebesar 6,539

b. Variabel kualitas aparatur pemda terdiri dari 7 butir pertanyaan. Dengan skala likert 1-5. Pada variabel kualitas aparatur

- pemda mempunyai nilai minimum 18 dan nilai maksimum 31. Nilai *mean* 24,58 dengan standar deviasi sebesar 2,949
- c. Variabel good governance terdiri dari 10 butir pertanyaan. Dengan skala likert 1-5. Pada variabel good governance mempunyai nilai minimum 33 dan nilai maksimum 48. Nilai *mean* 40,99 dengan standar deviasi sebesar 3,625
 - d. Variabel pemanfaatan TI terdiri dari 8 butir pertanyaan. Dengan skala likert 1-5. Pada variabel pemanfaatan TI mempunyai nilai minimum 26 dan nilai maksimum 40. Nilai *mean* 33,29 dengan standar deviasi sebesar 3,338
 - e. Variabel kualitas laporan keuangan terdiri dari 12 butir pertanyaan. Dengan skala likert 1-5. Pada variabel kualitas laporan keuangan mempunyai nilai minimum 41 dan nilai maksimum 57. Nilai *mean* 48,44 dengan standar deviasi sebesar 3,476.

UJI NORMALITAS

Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,05038081
Most Extreme Differences	Absolute	0,092
	Positive	0,092
	Negative	-0,059
Test Statistic		0,092
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan table diatas, pengujian menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov menunjukkan bahwa tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kuesioner penelitian ini telah lolos uji normalitas sehingga data yang ada dapat digunakan lebih lanjut.

UJI MULTIKOLINERITAS

Hasil Uji Multikolinieritas

Keterangan	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Penerapan SAP	,979	1,021	Tidak terjadi Multikolinieritas
Kualitas Aparatur Pemda	,887	1,127	Tidak terjadi Multikolinieritas
Good Governance	,588	1,701	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pemanfaatan TI	,646	1,548	Tidak terjadi Multikolinieritas

Hasil pengujian Tabel diatas menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

UJI HETEROKEDASTISITAS

Hasil Uji Heterokedastisitas

Keterangan	T	Sig.
(Constant)	-1,676	,098
Penerapan SAP	1,736	,087
Kualitas Aparatur Pemda	1,321	,191
Good Governance	,799	,427
Pemanfaatan TI	,434	,666

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel (penerapan SAP, kualitas aparatur pemda, good governance, dan pemanfaatan TI) memiliki nilai signifikan > 0,05. Dari hasil yang didapatkan, maka data ini tidak terdapat adanya heteroskedastisitas antar variabel.

HASIL UJI F

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	197,135	4	49,284	4,998	,001 ^b
	Residual	660,642	67	9,860		
	Total	857,778	71			

Hasil pengolahan data terlihat nilai F sebesar 4,998 dengan signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka hal tersebut berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu penerapan SAP, kualitas aparatur pemda, good governance, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara

bersamaan terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.

UJI KOEFISIEN DETERMINAN

Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,946 ^a	,894	,888	0,00731

Pada tabel diatas dapat diketahui nilai adjusted R square adalah sebesar 0,672 atau 67,2%. Hal ini berarti bahwa variabel penerapan SAP, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance, dan pemanfaatan teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 88,8% sedangkan 11,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil dari uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa penelitian ini telah melakukan uji statistik untuk mengukur pengaruh variabel independen secara parsial dan simultan dalam mempengaruhi variabel dependen, serta telah mengukur seberapa jauh keterikatan antara variabel independen (penerapan SAP, kualitas aparatur pemda, good governance, dan pemanfaatan teknologi informasi) terhadap variabel dependen. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa model penelitian ini layak atau dapat diterima.

HASIL UJI HIPOTESIS

keterangan	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	,050	,016	3,059	,003
Penerapan SAP	,161	,069	2,326	,023
Kualitas Aparatur Pemda	-4,065	,000	-2,924	,005
Good Governance	,259	,155	1,665	,101
Pemanfaatan TI	,466	,150	3,104	,003

PEMBAHASAN

Pengaruh penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi $0,023 < \alpha = 0,05$. Nilai koefisiensi β dari variabel X1 bernilai positif yaitu 0,187. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan SAP akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel penerapan SAP memiliki pengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan karena dalam standar akuntansi pemerintahan berisi komponen-komponen lengkap dan rinci yang harus ada dalam laporan keuangan. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan dapat menghasilkan suatu kualitas informasi laporan keuangan yang baik dan benar. Terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik dan benar akan membantu terwujudnya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan yang memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan didalam proses sosialisasi individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma intenal mereka. Organisasi yang menerapkan SAP tentunya akan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ratnasari (2018), Gumelar (2017), Munasyir (2015), Wati et al. (2014), yang memberikan hasil serta menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Fikri (2016) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,05. Nilai koefisiensi β dari variabel kualitas aparatur pemerintah bernilai negatif yaitu -0,269 artinya apabila kualitas aparatur pemerintah daerah mengalami penurunan, maka hal tersebut tidak akan memiliki pengaruh kepada kualitas laporan keuangan.

Tidak adanya pengaruh yang dihasilkan variabel kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan memberikan penjelasan bahwa setiap penurunan kualitas aparatur pemerintah daerah tidak sejalan dengan kualitas laporan keuangan. Dengan hasil yang telah didapatkan maka hipotesis kedua yaitu kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan **ditolak**.

Hasil uji tersebut sesuai dengan data persepsi responden terhadap variabel kualitas aparatur pemerintah daerah yang dijelaskan pada tabel 4.9. Variabel kualitas aparatur pemerintah daerah memiliki 7 item pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1-5 yang memiliki nilai maximum sebesar 35 dan nilai minimum sebesar 7. Dari data tersebut dapat kita ketahui terdapat 21 orang yang tidak setuju dengan pertanyaan pertama dari variabel kualitas aparatur pemerintah daerah mengenai SDM bagian keuangan min lulusan D3 Akuntansi. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya perekrutan aparatur pemerintah daerah yang bekerja di OPD Kabupaten Semarang terutama di bidang keuangan tidak diwajibkan berasal dari akuntansi melainkan terbuka untuk semua jurusan meskipun akuntansi diutamakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Aritonang (2018) dimana hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya

manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Synthia (2017), Triwardana (2017), dan Aini (2015) bahwa kompetensi sumber daya manusia/kualitas aparatur daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable *good governance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,101. Nilai koefisiensi β dari variabel *good governance* bernilai positif yaitu 0,204. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa terwujudnya *good governance* tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Good governance berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin baik buruknya *good governance*, maka tidak mampu meningkatkan atau menurunkan kualitas laporan keuangan. Hasil ini mendukung penelitian Kesuma (2017), yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, karena tata kelola (*good governance*) akan dikerjakan oleh sebaik-baiknya oleh semua aparatur pemerintahan, sehingga tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini berimplikasi pada tata kelola pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, pertanggung jawaban, dan efektivitas. Dengan terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam suatu instansi akan menciptakan pengaruh baik dalam kerja sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kondisi ini karena kualitas laporan keuangan di kerjakan oleh sumber daya manusia dan sistem pengendalian yang ada dalam organisasi tersebut, sedangkan tata kelola organisasi hanya sebagai pengawas dalam sistem. apabila *good governance* baik

akan tetapi tidak didukung dengan sistem pengendalian dan kualitas SDM, maka kualitas laporan keuangan belum bisa memberikan hasil yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi good governance (X3) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan **ditolak**.

Hasil uji tersebut sesuai dengan data persepsi responden terhadap variabel good governance yang dijelaskan pada tabel 4.10. Variabel good governance memiliki 10 item pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1-5 yang memiliki nilai maximum sebesar 50 dan nilai minimum sebesar 10. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata terendah berada pada pertanyaan kedua mengenai keterbukaan penyampaian aliran dana terhadap masyarakat. Terdapat 2 orang yang menyatakan tidak setuju dan 12 orang yang menyatakan netral. Hal ini disebabkan karena tidak semua aliran penggunaan dana di OPD Kabupaten Semarang disampaikan ke publik secara terbuka meskipun penggunaannya telah dilakukan dengan bijak.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi $0,003 < \alpha = 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X4 bernilai positif yaitu 0,337. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel pemanfaatan teknologi informasi sangat berkaitan dalam rangka penyusunan laporan keuangan mengingat semakin kompleksnya transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan yaitu berupa penggunaan perangkat komputer dan sambungan internet yang tentu dapat membantu pekerjaan para aparatur pemerintah daerah dalam hal penyederhanaan pekerjaan,

efisiensi waktu dan mencegah terjadinya kesalahan yang material.

Seluruh OPD di Kabupaten Semarang sudah menyediakan perangkat komputer dan jaringan internet yang memadai sehingga proses akuntansi sejak awal dari pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan sebagian besar sudah dilakukan secara komputersasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pamungkas (2017) yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali, dan penelitian Kalumata dkk (2016) di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, serta penelitian Wibawa dkk (2017) di lingkungan SKPD Kabupaten Buleleng yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Riandani (2017) yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Semarang, maka semakin tinggi penerapan SAP akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Semarang. Hal ini menunjukkan tinggi atau rendahnya kualitas aparatur pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Good governance berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa good governance memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Semarang. Artinya semakin besar pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan

IMPLIKASI

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi aparatur pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkup pemerintah daerah. Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dapat dilakukan dengan beberapa faktor pendukung diantaranya penerapan SAP, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penyusunan laporan keuangan sebaiknya dilakukan oleh pegawai/aparatur pemerintah daerah dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga akan mempermudah dalam memahami proses pencatatan akuntansi serta diharapkan lebih aktif mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan, pelatihan, serta sosialisasi peraturan tentang akuntansi pemerintahan sehingga akan lebih mudah dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan di dukung terwujudnya good governance serta pemanfaatan teknologi informasi maka proses penyusunan laporan keuangan akan lebih efektif serta memiliki kualitas yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

KETERBATASAN PENELITIAN

Pengembalian hasil kuesioner dirasa kurang maksimal karena kesibukan para aparatur pemerintah daerah

Disaat penyebaran kuesioner, terdapat beberapa responden yang tidak mengisi Akses dan perijinan beberapa instansi terkait dalam pengambilan hasil kuesioner dirasa kurang memadai.

Terbatasnya waktu penyebaran kuesioner yang mengakibatkan kurang maksimalnya hasil penelitian yang diperoleh.

SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : Bagi pemerintah Kabupaten Semarang (Organisasi Pemerintah Daerah), saran yang diberikan adalah meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dengan memberikan tambahan pengetahuan tentang kualitas laporan keuangan melalui seminar atau workshop tentang menyusun laporan keuangan yang berkualitas serta meningkatkan good governance dengan pengendalian yang lebih baik dan terukur

Bagi penelitian yang akan datang bisa menggunakan alat penelitian tambahan seperti pengisian kuesioner secara online dengan menyertakan link sehingga sampel yang dijangkau bisa lebih banyak dan jumlah kuesioner yang diolah bisa lebih maksimal dan lebih efektif untuk mempersingkat waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov

- NTB).", *Journal Akuntabilitas*, 9(1), 27–42.
- Anshari, & Syofyan, E. (2012). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. 1–18.
- Aruan N. (2003). "Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Studi Empiris di Jawa Timur". Jawa Timur: Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur.
- Azlina, N., & Amelia, I. (2015). Pengaruh *Good Governance* Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 32.
- Fransiska, N., Sarwono, aris eddy, & Astuti, dewi saptantinah. (2012). Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Akuntansi Syariah*, 323–331. Retrieved from
- Ghozali, I. (2018). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25** Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyanto, Agus. 2012. Penggunaan Basis AkruaL Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi. Dharma Ekonomi*. No.36
- Husna, Fadhilla. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Padang Panjang).
- Jannaini, Yuli. 2012. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung)**. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Kapasitas, P., Daya, S., Informasi, T., Sistem, D. A. N., Intern, P., Terhadap, P., ... Bengkulu, K. (2014). *SKRIPSI OLEH : Siti Soimah OLEH : Siti Soimah*.
- Kiranayanti, I., & Erawati, N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1290–1318.
- Kusumah, Arif Ardi. 2012. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Accounting*. Vol 1, No. 1.
- Lestiawan, H. Y., Yogyakarta, U. M., Jatmiko, B., & Yogyakarta, U. M. (2015). *Key Success Factor Good Government Governance* Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). *Maksimum*, 5(1), 32–49.
- Lubis, M. (2018). **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis AkruaL, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Kanwil Kementerian Agama Provensi**. Tesis.
- Mardiasmo, 2006, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1, Mei 2006 Hal 1 – 17
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W.

- (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.
- Nasrun, 2019)Nasrun, M. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 19–26.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.1,No.1.Hal: 2337-3806.
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. *Journal of Accounting Of Accounting*, 2(2), 2.
- Ponamon, I. F. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Pemerintah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 68–80.
- Pratolo, S.,2010, “Peran Good Government Governance untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah dalam Menghadapi Tantangan Global”, *Simposium Riset Ekonomi IV*, 2010
- Primayan, K. H., Atmadja, A. T., & Darwaman, N. A. S. (2014). *Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng)* Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Sari, D., 2013, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temua Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, *Proceeding SNA XVI* sesi 1, 2013,hal. 1007.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179.
- Sholikhah;, R. N., Astuti;, D. S. P., & Sunarko;, M. R. (2016). Pengaruh Pegawai Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(April), 168–175.
- Sihombing, Binsar. 2011. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualiatas Laporan Keungan Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Soimah, Siti. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem*

Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Skripsi. Universitas Bengkulu.

Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2.

Solikin, Ikin dan Kustiawan, Memen. 2012. *Meningkatkan Kualitas Informasi Akuntansi Melalui Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Dala Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ekonomi Akuntansi.*

Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Vol.1,No.1. Yudianta, I Gede Agus. Ni Made Adi

Wati, Kadek Desiana, N. T. H. dan N. K. S. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan SAKP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-*

IDENTITAS PENELITI



Nama : Desy Dwi Rachmawati
NIM : 31401606349
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Desember 1997
Alamat : Perumahan Afa permai Jl. Afa 2 No.11, Klipang, Kelurahan Sendangmulyo, Kec.Tembalang, Kota Semarang
No. HP : 085727795960
Email : dwiradesy@gmail.com
Instansi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Alamat Instansi : Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang 5011 Jawa Tengah
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Artikel : **“pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada organisasi pemerintah daerah kabupaten semarang)”**